

ANALISIS KINERJA PENDAPATAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2023

Clara Mutiara¹, Hairun Nisa², Nur Fahria Badraf³, Nurma Ranti Septiani⁴

Universitas Bina Sarana Informatika ¹²³⁴, Jakarta Pusat, Indonesia

claramutiara270104@gmail.com¹, nhairun9@gmail.com², fahriabadraf@gmail.com³,
nurmarantii28@gmail.com⁴

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No : 12 Desember 2024 Halaman: 1-6 Keywords: Financial Performance Revenue Budget Financial Rations	This study examines the Analysis of Revenue Performance in the Budget Realization Report of West Java Province for the Years 2022-2023. The method used in this research is descriptive quantitative, utilizing secondary data. The findings indicate that the financial performance of West Java Province's revenue is relatively good in several aspects, such as revenue growth in locally generated revenue (PAD) with an average of 7.22%, independence ratio with an average of 69.35%, effectiveness ratio with an average of 99.99%, and efficiency ratio with an average of 1.41%. However, there was a slight decline in variance due to actual revenue being lower than the planned budget.

Abstrak

Penelitian ini berisi tentang Analisis Kinerja Pendaptan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan pendapatan provinsi Jawa Barat yang cukup baik dari beberapa aspek seperti pertumbuhan pendapatan pada PAD dengan rata-rata 7,22%, rasio kemandirian dengan rata-rata 69,35%, rasio efektifitas dengan rata-rata 99,99%, dan rasio efisiensi dengan rata-rata 1,41%. Namun sedikit ada penurunan pada varians dikarenakan lebih kecilnya realisasi pendapatan daripada anggaran yang direncanakan.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan, Rasio Keuangan.

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan dalam mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk melaporkan setiap hasil dari anggaran daerahnya baik provinsi, kabupaten, dan kota secara berkala. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan adanya transparansi di lingkungan pemerintah yang mewajibkan setiap pengelola keuangan melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan jangkauan yang luas dan tepat waktu. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu pemerintah yang melaporkan hasil kinerja pendapatan setiap tahunnya. Jawa Barat adalah provinsi yang cukup banyak memiliki jumlah penduduk di Indonesia serta pusat perkonomian yang strategis, Pendapatan memiliki peran penting untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah Jawa Barat mencakup Pendapatan Asli Derah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya yang dikelola oleh provinsi.

Laporan kinerja pendapatan dirancang sesuai dengan peraturan yang ada untuk menilai keberhasilan pemerintah dari laporan tersebut. Analisis kinerja pendapatan merupakan sebuah proses dalam mengevaluasi hasil kerja pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola pendapatan daerah. Analisis kinerja pendapatan juga melibatkan beberapa aspek seperti sumber pendapatan yang berasal dari pajak, bea cukai, pendapatan sumber daya alam, kemudian memandingkan antara target pendapatan yang disusun dengan realisasi yang telah tercapai, mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun ke tahun.

Dalam menilai kinerja pendapatan daerah diperlukan laporan realisasi anggaran guna melihat seberapa besar anggaran yang digunakan setiap tahunnya. Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013, Laporan Realisasi Anggaran merupakan anggaran yang membandingkan suatu anggaran dalam suatu periode dengan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Laporan realisasi anggaran menunjukkan besarnya suatu anggaran yang direalisasikan dan membandingkannya dengan anggaran yang direncanakan dalam APBD. Untuk menjamin lembaga pemerintah yang akuntabel kepada masyarakat, maka alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja adalah analisis rasio keuangan daerah yang merupakan bagian pokok pengukuran kinerja dan prinsip pengelolaan. Maka dengan itu penelitian ini dilakukan guna menganalisis hasil kinerja pendapatan dalam laporan realisasi anggaran provinsi Jawa Barat.

METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif dilakukan dengan tujuan mengetahui keputusan atas suatu masalah yang terjadi dengan tahap penelitian melalui pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang di ambil dari Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2023 dengan menghitung rasio serta menganalisis kinerja pemerintah dari pendapatan yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan pendapatan adalah alat ukur dalam keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan, yang diharapkan terjadi peningkatan setiap tahunnya pada pendapatan daerah tersebut. Dengan adanya kenaikan pendapatan setiap tahunnya memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi daerah tersebut serta menjadi Langkah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan adalah data dari Laporan Realisasi Anggaran badan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat.

Analisis Kinerja Pendapatan

Untuk menganalisis pendapatan pemerintah menggunakan beberapa rasio keuangan diantaranya:

A. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians Anggaran Pendapatan merupakan analisis yang membandingkan realisasi dari pendapatan dengan anggaran pendapatan yang telah dibuat. Apabila kinerja keuangan di suatu daerah dikatakan baik, yaitu ketika selisih lebih dimana realisasi telah melebihi jumlah dari anggaran. Sebaliknya apabila kinerja keuangan anggaran pendapatan suatu daerah tersebut dikatakan kurang baik,yaitu ketika selisih lebih,dari pendapatan yang didapat kurang dari jumlah anggaran (Mahmudi,2010).

B. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah dilakukan untuk memahami pertumbuhan kinerja keuangan baik positif atau negative baik dalam tahun anggaran yang sesuai atau pada sepanjang periode anggaran. Apabila terjadi pertumbuhan positif maka kinerja keuangan pendapatan cenderung meningkat, sedangkan apabila pertumbuhan secara negative maka kinerja keuangan pendapatan daerah tersebut mengalami penurunan (Mahmudi,2010).

$$\text{Pertumbuhan PAD tahun } t = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\%$$

C. Analisa Rasio Keuangan

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan sumber pendapatan internal suatu daerah yaitu PAD dengan sumber dana eksternal. Hasil yang menunjukkan tingkat tingginya rasio kemandirian menunjukkan kemandirian daerah semakin meningkat dan semakin rendah tingkat ketergantungan daerah pada bantuan eksternal.

$$\text{Kemandirian keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio kemandirian(%)
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	>25%-50%
Sedang	>50%-75%
Tinggi	>75%-100%

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio Efektivitas merupakan tipe rasio yang menekankan kapabilitas pemerintah daerah dalam menciptakan Pendapatan Anggaran Daerah terkait dengan target yang dibuat sebelumnya telah direncanakan dan ditetapkan. Dilakukan target atas dasar pertimbangan dari potensi dan kemampuan sesungguhnya dari daerah tersebut. Untuk menghitung rasio efektivitas diperlukan mengkomparasikan antara pendapatan PAD realisasi dengan Pendapatan PAD yang akan mencapai target (Mahmudi, 2016).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efektif

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
79%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Rasio Efisiensi merupakan hasil dari perbandingan usaha yang dikeluarkan dan hasil yang telah dicapai untuk mencapai hasil yang baik. Semakin kecil hasil perbandingan yang ada maka akan semakin baik tingkat efisiensi tersebut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Presentase Efisiensi(%)	Kriteria Efisien
Sangat tidak efisien	>40%
Kurang efisien	31%-40%

Cukup efisien	21%-30%
Efisiensi	10%-20%
Sangat Efisien	<10%

Setelah melakukan pengumpulan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jawa Barat diperoleh data yang akan dilakukan analisis pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan tersebut maka untuk analisis pendapatan provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
2022	Rp.31.632.749.770.073	Rp.32.521.6440.045.747	Rp.888.890.275.674
2023	Rp.34.995.726.428.538	Rp.33.966.581.970.634	-Rp.989.144.457.904

Dari hasil tabel diatas diketahui hasil selisih antara anggaran dan pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp.888.890.275.674 dimana realisasi yang terjadi lebih dibandingkan dengan anggaran yang sudah direncanakan. Sedangkan pada Tahun 2023 realisasi pendapatan yang didapatkan lebih kecil dari pada anggaran yang dibuat dengan selisih Rp.989.144.457.904

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	PAD	Pertumbuhan	Pendapatan	Pertumbuhan
2022	Rp.22.535.151.787.309	10,83%	Rp.32.521.640.045.747	-10,40%
2023	Rp.23.572.977.548.326	4,61%	Rp.33.966.581.970.634	4,44%

Hasil data diatas menunjukkan pada tahun 2022 Pendapatan Anggaran Daerah terjadi kenaikan sebesar 10,83% dari tahun 2021 sedangkan seluruh pendapatan pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 10,40% dari tahun 2021. Pertumbuhan pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan baik pada Pendapatan Anggaran Daerah sebesar 4,61% dan Pendapatan sebesar 4,44%.

Analisis Rasio Keuangan

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Pendapatan	Rasio Kemandirian
2022	Rp.22.535.151.787.309	Rp.32.521.640.045.747	69,29%
2023	Rp.23.572.977.548.326	Rp.33.966.581.970.634	69,40%
Rata-rata			69,35%

Dari hasil rasio kemandirian yang di dapat pada 2022 sebesar 69,29% dan 2023 sebesar 69,40% serta rata-rata sebesar 69,35% diketahui bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam kategori sedang mampu membiayai 69,35% dari seluruh total belanja daerahnya dengan menggunakan Pendapatan Anggaran Daerahnya tanpa terlalu bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lain. Namun dari hasil tersebut juga diketahui walaupun rasio dikatakan cukup baik tetapi Provinsi Jawa Barat masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat karena dari hasil pendapatan belum cukup untuk memenuhi pengeluaran daerah tersebut.

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio Efektivitas

Tahun	PAD
-------	-----

	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas
2022	Rp.31.632.749.770.073	Rp.32.521.640.045.747	102,81%
2023	Rp.34.955.726.428.538	Rp.33.966.581.970.634	97,17%

Dari presentase rasio efektivitas yang ada pada tahun 2022 diketahui sebesar 102,81% dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pemerintah provinsi Jawa Barat telah melebihi target dari anggaran yang telah dibuat dan masuk kedalam kelompok kinerja yang sangat efektif. Tahun 2023 juga menunjukkan hasil yang cukup baik sebesar 97,17% dan telah mendekati target yang telah dianggarkan, dengan hasil tersebut pada tahun 2023 masuk kedalam kelompok kinerja pendapatan daerah cukup efektif. Hal ini dapat diartikan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sudah mampu mengelolah dan mengumpulkan pendapatan anggaran daerah dengan efektif. Walaupun kinerja tersebut sudah termasuk kedalam yang bisa dikatakan cukup efektif tetapi pemerintah harus tetap meningkatkan keefektivitasnya pada masa yang akan datang.

Rasio Efisiensi			
Tahun	Belanja	Pendapatan	Rasio Efisiensi
2022	Rp.380.895.150.129	Rp.32.521.640.045.747	1,17%
2023	Rp.561.494.911.885	Rp.33.966.581.970.634	1,65%

Dari hasil rasio efesiensi yang didapat diketahui pada tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pendapatan provinsi Jawa Barat sangat baik. Pada Tahun 2022 rasio efisiensi sebesar 1,17% dan pada tahun 2023 sebesar 1,65% dimana hasil ini menunjukkan bahwa provinsi Jawa Barat sangat efisien. Oleh sebab itu dapat diartikan bahwa Provinsi Jawa Barat sudah baik dalam menggunakan sumber dananya secara efisien walaupun pada tahun 2023 sedikit meningkat sebesar 0,48% tetapi hal terebut masih di bawah 10%. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat terus mengoptimalkan pengeluaran atau belanja daerahnya. Agar Tingkat efisiensi belanjanya terus di tingkat efisien di masa depan.

KESIMPULAN

Kinerja keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat dilihat dari analisis varians pendapatan Daerah pada tahun 2022 secara umum terbilang cukup baik karena sudah melebihi dari target anggaran yang telah dibuat. Sedangkan untuk tahun 2023 terjadi selisih kurang antara realisasi dengan anggaran, hal ini membuat realisasi pendapatan belum mencapai target anggaran yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Kinerja keuanagan pemerintah provinsi Jawa Barat dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2022-2023 secara umum masih kurang baik karena hasilnya menunjukkan penurunan pada PAD sebesar 6,22% dimana pada tahun 2023 presentase PAD menunjukkan 10,83% sedangkan 2022 sebesar 4,61%. Sedangkan untuk keseluruhan pendapatan daerah Jawa Barat pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya terjadi penurunan sebesar 10,40 pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 4,44%.

Kinerja keuangan pendapatan daaerah provinsi Jawa Barat dilihat dari rasio kemandirian tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa provinsi Jawa Barat sudah cukup mandiri untuk tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat, namun dari hasil tersebut provinsi Jawa Barat juga masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar 30,65%

Kinerja Keuangan pendapatan Daerah Jawa Barat dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan bahwa secara umum pendapatan pada tahun 2022-2023 sudah cukup efektif dimana pada

tahun 2022 sudah melebihi target yaitu sebesar 102,81% dan 2023 sebesar 97,17% walaupun belum mencapai namun dari hasil tersebut sudah cukup efektif.

REFERENCES

- Assidi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5), 1–11.
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Walandouw, S. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 534–541.
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–124. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644>
- Gultom, M., Sinurat, A., & Damanik, D. (2020). *PEMATANGSIANTAR Oleh* : 2(1), 12–17.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 5(2), 745–752.
- Sinambela, E., & Pohan, A. K. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 53(9), 1689–1699. journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/2056/2050
- (N.d.). Retrieved from <https://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2023/08/Laporan-Realisasi-Anggaran-Audited-2022.pdf>
- (N.d.). Retrieved from <https://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2024/08/LRA-2023-audited.pdf>